

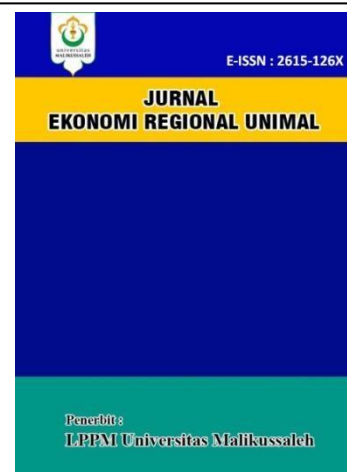
## PENGARUH PDRB, BELANJA DAERAH, DAN UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI SUMATERA UTARA

<sup>\*a</sup> Apnia Dumaris Br Pubra <sup>\*b</sup> Tarmizi Abbas <sup>\*c</sup> Murtala

<sup>\*</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh

Corresponding author:

[tarmizi@unimal.ac.id](mailto:tarmizi@unimal.ac.id)



### ARTIKELINF HAI R M PADA IO DI RINGKASAN

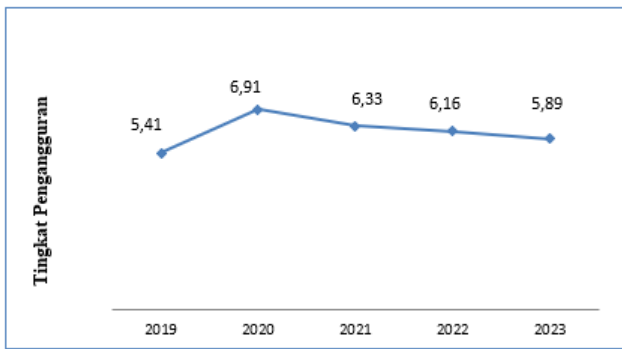
**Kata Kunci:**  
*Tingkat Pengangguran, PDRB, Pengeluaran Daerah, Upah Rendah*

Penelitian ini mengkaji keterkaitan antara tingkat pengangguran dengan belanja daerah, Pembayaran rendah, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penelitian ini menggunakan analisis Regresi Data Panel dengan perangkat lunak Eviews 10 untuk menguji gabungan data cross-sectional dan time series dari 25 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pengangguran di kabupaten/kota tersebut dipengaruhi secara positif dan mengesankan oleh Pembayaran rendah, tetapi secara negatif oleh PDRB. Terdapat pengaruh negatif dari belanja daerah, meskipun secara statistik tidak mengesankan. Tingkat pengangguran dipengaruhi secara mengesankan dan menguntungkan oleh PDRB, belanja daerah, dan Pembayaran rendah secara keseluruhan. Untuk mengurangi pengangguran, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus memprioritaskan peningkatan pertumbuhan PDRB dan melaksanakan kebijakan belanja daerah dan Pembayaran rendah.

### 1. PENDAHULUAN

Setiap negara menangani pengangguran dengan caranya sendiri, meskipun negara maju dan negara berkembang memiliki pendekatan yang berbeda terhadap masalah ini. Berbeda dengan negara maju, banyak negara berkembang tidak menyediakan jaminan sosial bagi warga negaranya yang menganggur. Baik ekonomi maupun masyarakat menderita ketika orang menganggur. Kekurangan lapangan kerja yang tersedia relatif terhadap angkatan kerja yang terus bertambah merupakan penyebab umum pengangguran, klaim Bangun (2023). Lulusan baru berhadapan dengan pekerja yang lebih berpengalaman di pasar kerja yang semakin kompetitif saat ini, yang semakin diperburuk oleh kemajuan teknologi yang membutuhkan kemampuan beradaptasi tenaga kerja yang cepat. Salah satu ukuran utama kesehatan ekonomi adalah tingkat pengangguran. Diduga sebagai akibat dari epidemi COVID-19, tingkat pengangguran terbuka di Sumatera

Utara naik dari 5,4% pada tahun 2019 menjadi 6,91% pada tahun 2020. Menurut Yetty (2019), PHK massal berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Fokus pada penciptaan lapangan kerja dan pelatihan keterampilan menjadi prioritas pemerintah Sumatera Utara. Meskipun pemerintah Indonesia telah menerapkan program-program seperti jaminan sosial dan pengembangan UKM dalam upaya menurunkan pengangguran, masih terdapat kendala, terutama pada sektor-sektor yang terdampak keras oleh krisis ekonomi. Oleh karena itu, untuk menciptakan strategi yang efektif, penting untuk menganalisis perkembangan pengangguran di Sumatera Utara dari tahun 2019 hingga 2023. Anda dapat melihat tingkat pengangguran di Sumatera Utara dari tahun 2019 hingga 2023 pada gambar di bawah ini:

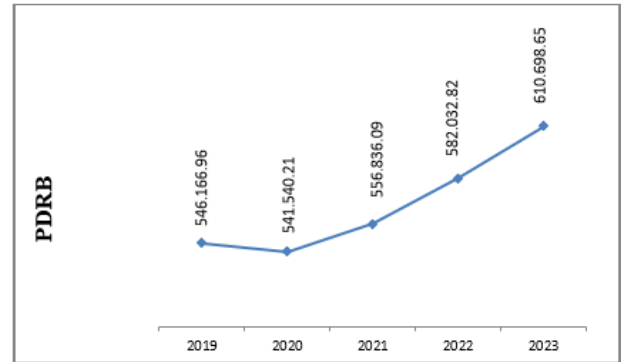


Sumber : BPS Sumatera Utara , (202 3 )

**Gambar 1 Angka Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Persen)**

Tingkat pengangguran di Sumatera Utara akan berfluktuasi antara tahun 2019 dan 2023, menurut statistik. Epidemii COVID-19 menyebabkan PHK yang meluas dan pertumbuhan penduduk melampaui prospek pekerjaan, mendorong tingkat pengangguran dari 5,41 persen pada tahun 2019 menjadi 6,91 persen pada tahun 2020. Sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya permintaan pekerja di industri seperti pariwisata dan manufaktur, tingkat pengangguran turun dari 6,1% pada tahun 2021 menjadi 5,89% pada tahun 2023. Beberapa faktor ekonomi, termasuk produk domestik bruto, pengeluaran daerah, dan Pembayaran rendah, dikaitkan dengan pengangguran. Aturan umum adalah bahwa ketika output meningkat, PDRB meningkat dan pengangguran turun sebagai akibat dari meningkatnya permintaan pekerja. Di sisi lain, ketika PDRB turun, permintaan tenaga kerja juga turun. Di sisi lain, faktor-faktor seperti ketimpangan pendapatan, pembangunan ekonomi yang tidak merata, dan kurangnya kesesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan permintaan pasar memperumit hubungan antara PDRB dan pengangguran di Sumatera Utara dari tahun 2019 hingga 2023.

Untuk tahun 2019–2023, angka PDRB Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

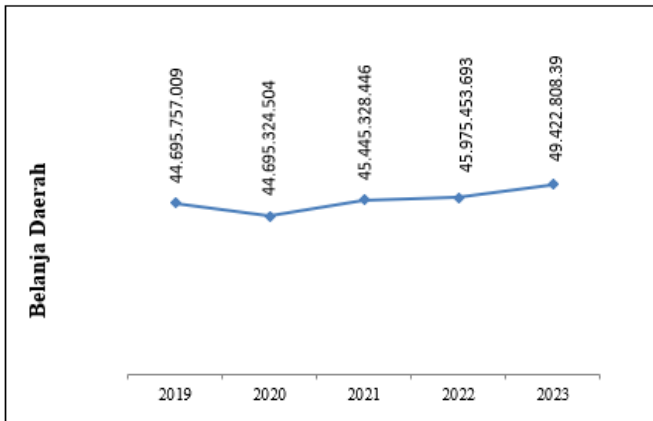


Sumber : BPS Sumatera Utara 2023

**Gambar 2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Rupiah)**

Akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk pariwisata dan transportasi, PDRB Sumatera Utara turun dari Rp541.166,96 pada tahun 2019 menjadi Rp541.504,21 pada tahun 2020, menurut data tersebut. Produksi turun dan pengangguran meningkat sebagai akibat dari penurunan PDRB (Arizal, 2019). Meskipun demikian, PDRB tumbuh cukup signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2023, yaitu mencapai Rp556.836,09 pada tahun 2021, Rp582.032,82 pada tahun 2022, dan Rp610.698,65 pada tahun 2023.

Pemulihan ekonomi pascapandemi, khususnya di sektor usaha pengolahan nonmigas, dan meningkatnya daya beli menjadi faktor utama pendorong ekspansi tersebut (Sari, 2021). Angka pengangguran pun menurun selama kurun waktu tersebut, yang sejalan dengan korelasi antara kenaikan PDRB dan turunnya angka pengangguran (Fikri & Anis, 2023). Untuk mendanai pertumbuhan dan mencapai tujuan yang ditetapkan, peningkatan pendapatan daerah menjadi hal yang penting. Semakin besar pendapatan daerah, semakin banyak pula dana yang tersedia untuk pertumbuhan karena digunakan untuk amenities dan infrastruktur. Sebaliknya, belanja daerah ditujukan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menambah sumber keuangan daerah melalui penyediaan fasilitas dan dorongan kegiatan daerah. Tren belanja daerah Sumatera Utara dari tahun 2019 hingga 2023 adalah sebagai berikut:

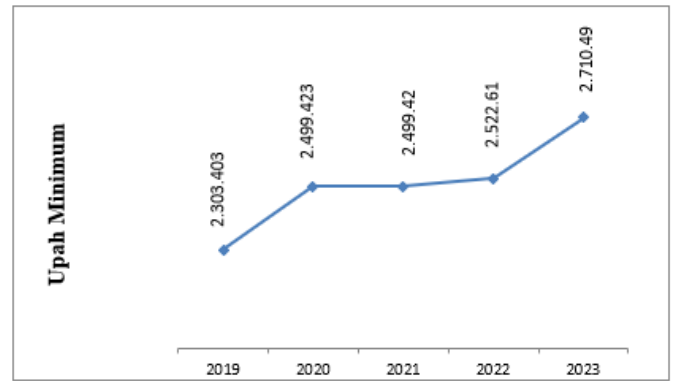


Sumber : BPS Sumatera Utara 2023

**Gambar 3 Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Rupiah)**

Data tersebut menunjukkan perkembangan belanja daerah di Sumatera Utara dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Pandemi COVID-19 berdampak pada aktivitas ekonomi, penerimaan pajak, dan keterlambatan proyek sehingga menyebabkan belanja daerah turun dari Rp44.695.757.009 pada tahun 2019 menjadi Rp44.695.324.504 pada tahun 2020. Belanja daerah meningkat dari Rp45.445.328.446 pada tahun 2021 menjadi Rp49.422.808.390 pada tahun 2023 didorong oleh pemulihan dunia usaha pascapandemi yang meningkatkan aktivitas bisnis dan permintaan layanan publik.

Angka pengangguran selama ini mengalami penurunan, sesuai dengan penelitian yang menunjukkan bahwa belanja daerah dapat menurunkan pengangguran (Naza et al., 2020). Namun, penelitian lain menunjukkan hal yang sebaliknya (Huda & Karsudjono, 2021). Rendahnya upah menjadi masalah terbesar ketenagakerjaan di Sumatera Utara. Hal ini menyebabkan tingginya angka pengangguran karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Berikut ini adalah lintasan upah rendah Sumatera Utara dari tahun 2019 hingga 2023:



Sumber : BPS Sumatera Utara 2023

**Gambar 4 Upah Minimum Di Sumatera Utara 2019-2023 (Rupiah)**

Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara (UMP) berdasarkan data tahun 2023 mengalami kenaikan dari Rp2.303.403 pada tahun 2019 menjadi Rp2.710.493 pada tahun 2023. Kenaikan UMP berpotensi menaikkan biaya produksi yang pada gilirannya dapat menyebabkan pelaku usaha melakukan PHK sebagai upaya penghematan sehingga dapat meningkatkan angka pengangguran (Fikri & Anis, 2023). Inflasi dan pembangunan ekonomi biasanya menjadi pemicu kenaikan UMP. Di sisi lain, berdasarkan penelitian (Yetty et al., 2019) terdapat korelasi positif antara UMP dengan angka pengangguran dan data tahun 2020-2022 saat UMP dinaikkan menunjukkan angka pengangguran juga mengalami kenaikan. Upaya pemerintah untuk menekan angka pengangguran belum sepenuhnya berhasil di Sumatera Utara yang pada tahun 2023 angka pengangguran diperkirakan mencapai 6,16 persen. Pemerintah Provinsi berharap dapat menurunkan angka pengangguran dengan cara menaikkan PDRB, mengalokasikan dana lebih besar ke daerah, dan menetapkan UMP.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Tingkat Pengangguran

Terdapat hubungan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja dan Pembayaran; fleksibilitas upah memengaruhi tingkat pengangguran. Meskipun kesempatan kerja penuh dimungkinkan dalam keadaan ideal, permintaan pekerja menurun selama masa krisis ekonomi (Kaufman & Hotchkiss, 1999; Soeharjoto & Oktavia, 2021). Setiap orang yang tidak bekerja baik mereka yang sedang aktif mencari pekerjaan, memulai perusahaan, atau sekadar tidak yakin

akan mendapatkan pekerjaan—dianggap sebagai pengangguran (Kuncoro, 2015). Ranis dan Fei mendukung argumen Lewis, yang menunjukkan bahwa pengangguran tinggi juga terjadi di empat negara berkembang dengan populasi tenaga kerja yang besar.

Peningkatan tenaga kerja akan berdampak negatif pada daya beli konsumen, pembayaran, dan produsen, menurut Keynes, yang berpendapat bahwa pasar bebas tidak mampu menyelesaikan masalah pengangguran.

## **PDRB**

Sukirno (2012) menyatakan bahwa PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto semua sektor ekonomi di suatu negara atau daerah. Jika output dikurangi dengan biaya produksi, maka hasilnya adalah nilai tambah bruto.

Pendapatan (termasuk pembayaran dan pembayaran), biaya (termasuk sewa dan penyusutan), dan pajak tidak langsung neto merupakan komponen nilai tambah bruto. Angka PDRB dihitung dengan menggabungkan nilai tambah bruto dari berbagai sektor. Produk regional bruto (PDRB) adalah ukuran nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit bisnis di suatu wilayah selama periode waktu tertentu (BPS, 2007). Ada dua cara untuk melihat PDRB: pertama, menurut sektor bisnis, yang mencakup semua kegiatan ekonomi di wilayah tersebut dan nilai kontribusinya; kedua, menurut penggunaan, yang mencakup nilai konsumsi akhir.

## **Belanja Daerah**

Anggaran tidak hanya mengumpulkan pajak dan menyediakan dana, tetapi juga mengendalikan berapa banyak pengeluaran pemerintah. Setahun adalah jangka waktu yang paling umum untuk penyusunan anggaran, namun jangka waktu yang lebih pendek atau lebih panjang juga dimungkinkan (Wirawan, 2019).

Belanja daerah menurut (Saniah & Murtala, 2024) diartikan sebagai pengeluaran daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota. Dari dana anggaran belanja daerah

tersebut diharapkan dapat digunakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan daerah. Semua pengeluaran yang bersumber dari kas umum daerah, sebagaimana dijelaskan oleh Darise (2008), merupakan bagian dari belanja daerah yang merupakan kewajiban yang tidak dapat ditarik kembali sehingga mengurangi penyertaan uang. Menurut Armaja dkk. (2017) dan Mahmudi (2006), investasi daerah merupakan janji pemerintah daerah untuk mengurangi kekayaan bersih dari transaksi sebelumnya.

## **Upah Minimum**

Untuk melindungi karyawan dari kompensasi rendah yang eksploitatif, bisnis diharuskan untuk mematuhi undang-undang Pembayaran Rendah. Peraturan ini sangat cocok untuk pekerja bergaji rendah dan kelas menengah karena hukuman yang menyertai penerapannya (Sungkar, 2015). Penting untuk berhati-hati saat menggunakan Pembayaran Rendah untuk mengurangi kemiskinan, karena dampaknya bergantung pada bagaimana keluarga terstruktur dalam hal pekerjaan.

Untuk menghindari kekecewaan pekerja berketerampilan rendah atau munculnya kesempatan kerja tidak tetap, penting untuk menetapkan Upah Rendah pada tingkat yang sesuai; menetapkan Upah Rendah terlalu rendah dapat menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan (ILO, 2011). Upah bulanan terendah yang terdiri dari Upah Pokok dan Tunjangan Tetap ditetapkan sebagai Upah Rendah menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1 Tahun 1999. Di sisi lain, Gubernur menetapkan batas bawah Upah Rendah provinsi.

## **Hubungan Faktor Independen dengan Faktor Dependen**

### **1. Hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Pengangguran**

Terdapat korelasi yang kuat antara tingkat pengangguran dengan PDRB, yaitu nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah selama kurun waktu tertentu. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, PDRB menjelaskan pertumbuhan dan kinerja perekonomian. Perluasan perekonomian yang ditunjukkan dengan kenaikan PDRB dapat menciptakan kesempatan kerja tambahan. Arizal (2019) menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka berkorelasi negatif dengan PDRB, yang

menunjukkan bahwa kenaikan PDRB dapat menurunkan tingkat pengangguran dan penurunan PDRB dapat menaikannya. Korelasi ini sejalan dengan Hukum Okun yang menyatakan bahwa secara rata-rata tingkat pengangguran yang lebih rendah dikaitkan dengan PDRB yang lebih tinggi.

## 2. Hubungan antara Pengeluaran Daerah dan Tingkat Pengangguran

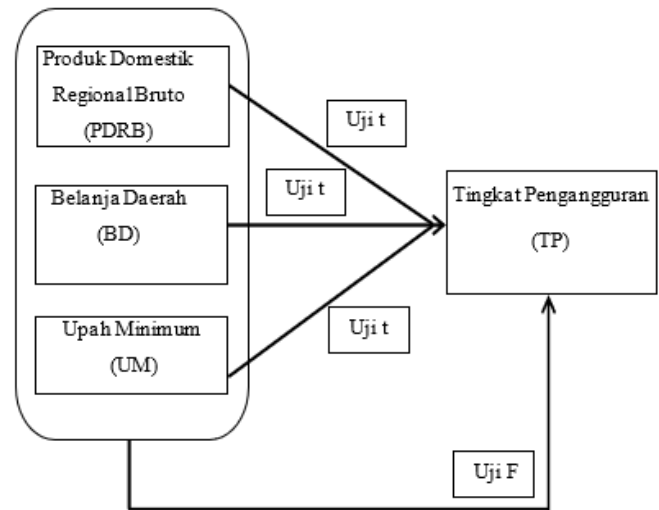
Ada harapan bahwa pertumbuhan akan didukung dan bahwa tujuan yang direncanakan akan tercapai lebih cepat dengan peningkatan pendapatan daerah. Infrastruktur lokal dan pusat komunitas didanai oleh pendapatan pajak daerah. Sumber daya yang lebih besar tersedia untuk investasi dan pengeluaran seiring dengan meningkatnya pendapatan daerah. Tujuan pengeluaran daerah adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi dan menyediakan fasilitas masyarakat yang sangat dibutuhkan. Akan ada peningkatan pendapatan daerah sebagai akibat dari pengangguran yang lebih rendah dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik yang disebabkan oleh lebih banyak aktivitas. Baik pengeluaran wajib maupun opsional dimasukkan dalam pengeluaran daerah oleh berbagai entitas dan lembaga daerah (Naza et al., 2020).

## 3. Hubungan Antara Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran di suatu wilayah dipengaruhi oleh Pembayaran. Jumlah orang yang dipekerjakan sangat dipengaruhi oleh gaji yang ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa orang mungkin menolak posisi dengan gaji rendah untuk menghindari pembayaran gaji yang tinggi (Alghofari, 2009). Di sisi lain, peningkatan tingkat pengangguran dapat disebabkan oleh Pembayaran yang ditetapkan pada tingkat yang sangat rendah. Peningkatan Pembayaran, dilihat dari sudut pandang bisnis, menyebabkan lebih banyak biaya produksi, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan efisiensi dan, akhirnya, PHK, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat pengangguran.

## Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mengenai pengaruh PDRB, belanja daerah dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Utara adalah :



Gambar Kerangka Konseptual

## Hipotesa

Berdasarkan landasan teori dan kerangka kerja yang telah dibahas sebelumnya, berikut ini adalah hipotesis kerja penelitian ini.

- H1: Tingkat Pengangguran Sumatera Utara mungkin dipengaruhi secara negatif oleh PDRB.
- H2: Tingkat pengangguran di Sumatera Utara mungkin dipengaruhi secara negatif oleh pengeluaran daerah.
- H3: Dipercayai bahwa menaikkan Gaji Rendah dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran di Sumatera Utara.
- H4: Tingkat pengangguran di Sumatera Utara mungkin dipengaruhi oleh PDRB, belanja daerah, dan gaji yang rendah.

## 3. METODE PENELITIAN

### Tipe dan Sumber Data

Data kuantitatif yang berupa nilai-nilai numerik digunakan dalam penelitian ini. Informasi ini diperoleh dari sumber sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (Yudisthira & Budhiasa, 2013). Penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan data time series tahun 2019–2023 dengan data cross-sectional dari 25 kabupaten/kota. Delapan

kabupaten/kota tidak memiliki statistik Pembayaran yang rendah, sehingga kami harus memilih 25 kabupaten/kota.

### Pengumpulan data

Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari laman yang diterbitkan Badan Informasi Pusat (BPS).

### Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan regresi data panel, yaitu pendekatan analisis data yang memadukan informasi time series dan cross-sectional. Karena sifat observasi yang termasuk dalam data panel bersifat lintas sektor dan lintas waktu, maka tidak mungkin untuk menghilangkan heterogenitas secara menyeluruh. Hasilnya, kami memperoleh persamaan berikut untuk model studi kami:

$$TP_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LogPDRB}_{it} + \beta_2 \text{LogBD}_{it} + \beta_3 \text{LogUM}_{it} + \varepsilon_{it}$$

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas wilayah 71.680,68 km<sup>2</sup> menempati sekitar 3,72 persen dari total luas wilayah Indonesia dan terletak di antara 10°-40° Lintang Utara dan 98°-100° Bujur Timur. Wilayah ini memiliki 162 pulau, 6 di antaranya terletak di sepanjang pantai.

Pantai, dan 156 di Barat. Batas utara adalah Provinsi Aceh, batas selatan adalah Provinsi Riau dan Sumatera Barat, batas barat adalah Samudra Hindia, dan batas timur adalah Selat Malaka. Lokasinya yang strategis di Selat Malaka, antara Singapura, Malaysia, dan Thailand, menjadikannya jalur penting bagi perdagangan internasional.

### Penentuan Teknik Estimasi Data Panel

Dalam menentukan model terbaik terdapat dua cara yang digunakan dalam regresi data panel yaitu

yang pertama Uji Chow yang digunakan untuk memilih antara model *common effect* atau model *fixed effect*. Kedua, Uji Hausman yang digunakan memilih antara *fixed effect* dan *random effect* yang terbaik dalam estimasi data panel.

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	25.134392	(24,97)	0.0000
Cross-section Chi-square	247.088415	24	0.0000

Sumber: Data diolah peneliti 2024

Nilai probabilitas Chi-Square adalah 0,0000, yang berasal dari Tabel Uji Redundant FEM, yang kurang dari  $\alpha$  5% (0,05). Dengan demikian, Common FEM tidak cocok untuk penyelidikan ini; sebaliknya, FEM lebih cocok. Oleh karena itu, analisis dapat dilanjutkan ke REM setelah memilih FEM.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Hausmant**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	11.715377	3	0.0084

Sumber: Data diolah peneliti 2024

Nilai kemungkinan Chi-Square adalah 0,0084, yang lebih kecil dari  $\alpha$  5% (0,05), menurut temuan Tabel Uji Hausman. Hal ini membuktikan bahwa, dibandingkan dengan model efek acak, model efek tetap lebih unggul. Oleh karena itu, uji Lagrange Multiplier tidak diperlukan karena model ini adalah yang terbaik.

### Analisis Data Panel

Model yang terpilih dalam penelitian ini yaitu *fixed effect* model. Berikut adalah hasil regresi *fixed effect* model yang merupakan model terpilih :

**Tabel 3**  
**Fixed Effect**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	40.53591	17.99222	2.252969	0.0265
LOG(PDRB)	-8.411911	2.985156	-2.817914	0.0059
LOG(BD)	-1.161437	1.060569	-1.095107	0.2762
LOG(UM)	7.600368	2.627561	2.892557	0.0047

---

Effects Specification

---

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.882262	Mean dependent var	5.464880
Adjusted R-squared	0.849490	S.D. dependent var	2.257731
S.E. of regression	0.875901	Akaike info criterion	2.767271
Sum squared resid	74.41873	Schwarz criterion	3.400813
Log likelihood	-144.9544	Hannan-Quinn criter.	3.024646
F-statistic	26.92088	Durbin-Watson stat	1.543990
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data diolah peneliti 2024

Berdasarkan Tabel 3, dapat diperoleh persamaan hasil regresi sebagai berikut:

$$TP_{it} = 40,536 - 8,4119LogPDRB_{it} - 1,1614LogBD + 7,6004LogUM_{it}$$

Di Sumatera Utara, Tingkat Pengangguran akan mendekati 40,5% jika PDRB, Belanja Daerah, dan Upah Rendah semuanya ditetapkan nol, menurut temuan regresi, yang menunjukkan nilai konstan ( $\beta_0$ ) sebesar 40,536. Dengan koefisien PDRB ( $\beta_1$ ) sebesar 8,4119, Tingkat Pengangguran diperkirakan akan turun sebesar 0,0841 persen untuk setiap kenaikan PDRB sebesar 1%, dengan asumsi Konsumsi Metropolitan dan Upah Rendah tetap sama. Tidak ada pengaruh yang mengesankan dari Koefisien Belanja Daerah ( $\beta_2$ ) sebesar 1,1614 terhadap Tingkat Pengangguran karena secara statistik tidak mengesankan (nilai-P = 0,2762 > 0,05). Apabila PDRB dan Belanja Daerah tetap sama, maka kenaikan 1% pada Pembayaran Rendah akan mengakibatkan kenaikan 0,076 persen pada Tingkat Pengangguran, sebagaimana ditunjukkan oleh Koefisien Pembayaran Rendah ( $\beta_3$ ) = 7,6004.

#### Hasil Uji (Uji-t)

Uji parsial dilakukan apabila nilai t statistik > t

tabel, maka variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen. Cara mendapatkan t tabel :  $(n-k) = 125-4 = 121$ . Berikut ini hasil pengujian secara parsial dalam penelitian ini, pada  $\alpha 5\% = 1,980$ .

**Tabel 4**  
**Uji Parsial (Uji-t)**

Variabel Bebas	t-Statistik	t-tabel	Alpha	Probabilitas	Keterangan
PDRB	-2.817914	1,980	0,05	0.0059	Signifikan
Belanja Daerah	-1.095107	1,980	0,05	0.2762	Tidak Signifikan
Upah Minimum	2.892557	1,980	0,05	0.0047	Signifikan

Sumber: Data diolah peneliti 2024

Berdasarkan data pada tabel, PDRB mempunyai pengaruh negatif yang tidak terlalu besar terhadap tingkat pengangguran di 25 kabupaten/kota di Sumatera Utara (t-hitung = -2,817914 < t-tabel = 1,980), dengan keyakinan  $0,0029 < 0,05$ . Dengan nilai kemungkinan  $0,2762 > 0,05$ , Belanja Daerah mempunyai pengaruh negatif yang dapat diabaikan terhadap tingkat pengangguran, karena nilai t-tabel sebesar 1,980 lebih kecil dari nilai Koefisien Belanja Daerah sebesar -1,095107. Nilai t-hitung sebesar 2,892557 yang lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,980 menunjukkan bahwa Pembayaran Rendah mempunyai pengaruh positif yang cukup besar terhadap tingkat pengangguran, dengan nilai kemungkinan  $0,0047 < 0,05$  untuk faktor Pembayaran Rendah.

#### Hasil Uji Simultan (Uji-F)

Apabila F statistik > F tabel dengan tingkat probabilitas maka secara bersama-sama mempengaruhi tingkat pengangguran. f tabel  $(k-1) (n-k) = (4-1) (125-4) = (3) (121)$  hasilnya pada 2,68. Berikut hasil pengujian simultan (uji F) pada penelitian ini :

**Tabel 5**  
**Uji Simultan (F)**

F Statistik	F Tabel	Alpha	Probabilitas	Keterangan
26.92088	2,68	0,05	0.000000	Signifikan

Sumber: Data diolah peneliti 2024

Berdasarkan data pada tabel, nilai F-statistik sebesar 26,92088 lebih besar dari nilai F-tabel sebesar 2,68 dan kemungkinan perbedaan tersebut adalah  $0,000000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa di 25 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, tingkat pengangguran dipengaruhi

secara signifikan dan positif oleh PDRB, belanja daerah, dan gaji yang rendah secara bersamaan.

### Hasil Uji Koefisien Determinasi $R^2$

Koefisien *Adjusted R-Squared* Apabila mendekati 0 maka hubungan antar variabel bebas dan terikat sangat lemah. Apabila mendekati satu hubungan variabel bebas dan terikat sangat kuat.

**Tabel 6**

#### Hasil Pengujian Koefisien Determinasi $R^2$

R-squared	0.882262	Mean dependent var	5.464880
Adjusted R-squared	0.849490	S.D. dependent var	2.257731

*Sumber: Data diolah peneliti 2024*

Tabel tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi Log(PDRB), Log(BD), dan Log(UM) secara bersamaan menyumbang 84,94% varians Tingkat Pengangguran (TP), dengan nilai  $R^2$  yang Disesuaikan sebesar 0,84948. Faktor-faktor lain yang tidak dibahas di sini menyumbang 15,06% sisanya.

#### Pengaruh PDRB terhadap Tingkat Pengangguran

Penelitian ini menemukan bahwa di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara, tingkat pengangguran dipengaruhi secara negatif dan mengesankan oleh PDRB, belanja daerah, dan gaji yang rendah. Konsisten dengan teori bahwa peningkatan PDRB merangsang permintaan tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru, kenaikan PDRB menurunkan tingkat pengangguran. Fikri dan Anis (2023) menunjukkan bahwa PDRB menurunkan pengangguran, dan penelitian kami sependapat dengan mereka. Sebaliknya, (Wahyuni & Murtala, 2019) menemukan bahwa PDRB meningkatkan pengangguran.

#### Pengaruh Belanja Daerah terhadap Tingkat

#### Pengangguran

Penelitian ini tidak menemukan hubungan yang signifikan secara statistik antara belanja daerah dengan tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Bahwa belanja daerah secara signifikan

dan negatif mempengaruhi pengangguran bertentangan dengan konsep awal. Mungkin ada kesenjangan keterampilan antara tenaga kerja saat ini dan kebutuhan pekerjaan baru, itulah sebabnya belanja daerah belum berhasil menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, dana yang seharusnya digunakan untuk inisiatif penyerapan tenaga kerja lebih sering digunakan untuk operasi internal dan belanja pegawai. Lebih lanjut, Naza et al. (2020) dan teori Keynesian sama-sama berpendapat bahwa belanja daerah secara signifikan mengurangi pengangguran, oleh karena itu hasil ini bertentangan dengan keduanya.

#### Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, upah rendah berpengaruh positif dan mengesankan terhadap tingkat pengangguran. Dengan demikian, teori awal benar; menaikkan upah rendah dapat menyebabkan kenaikan tingkat pengangguran. Perusahaan dapat memilih untuk mengotomatisasi pekerjaan atau mengurangi jumlah pekerja sebagai respons terhadap upah rendah yang tinggi, yang dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan. Sejalan dengan kesimpulan ini, penelitian Yetty dkk. (2019) menunjukkan korelasi positif dan secara statistik mengesankan antara upah rendah dan tingkat pengangguran; namun, penyelidikan Haikal (2023) menemukan yang sebaliknya, dengan efek negatif dan tidak mengesankan dari upah rendah terhadap pengangguran.

## 5. PENUTUPAN

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan :

1. Angka pengangguran di Provinsi Sumatera Utara sangat dipengaruhi oleh PDRB, angka pengangguran terlihat menurun apabila PDRB dinaikkan.
2. Tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara tidak dipengaruhi oleh pengeluaran daerah.
3. Peningkatan upah rendah mempunyai dampak positif dan mengesankan secara statistik terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.



4. Terdapat hubungan yang kuat antara Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara dengan PDRB, Belanja Daerah, dan Rendahnya Upah secara bersamaan.

### Saran

Berdasarkan penelitian, berikut beberapa saran:

1. Terkait Negara: Utamakan pendanaan daerah yang adil untuk pembangunan infrastruktur dan amenities daerah. Tingkatkan PDRB dengan menggenjot investasi dan produktivitas, terutama di sektor-sektor vital Sumatera Utara, agar semakin banyak orang yang dapat memperoleh pekerjaan. Selain itu, buat aturan pembayaran yang dapat membantu para pekerja dan membuat mereka lebih produktif.
2. Dalam rangka membantu Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara dalam mencapai tujuannya yaitu mengurangi pengangguran dan meningkatkan produktivitas masyarakat, maka perlu dilaksanakan program pemberian modal dan pelatihan keterampilan.
3. Peneliti di Masa Depan: Jadikan temuan penelitian ini sebagai titik awal, tetapi pikirkan untuk memperluasnya agar mencakup faktor tambahan yang mungkin memiliki dampak lebih besar pada tingkat pengangguran.

### Bibliografi

- Amrullah W, Istiyani N, MF (2019). *Analisis Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Pulau Jawa Tahun 2007-2016* . VI (1), 43–49.
- Angga, N. & E. (2019). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah, pembayaran rendah dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah* , 8 (2), 95–106. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v8i2.8323>
- Armaja, Ibrahim, R., & Aliamin. (2017). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* , 3 (2), 168–181.
- Aziz, AA dan, & Aan, J. (2022). Pengaruh Jumlah Industri, Gaji Rendah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020. *Bandung Conference Series: Economics Studies* , 2 (2), 400–410. <https://doi.org/10.29313/bcses.v2i2.3684>
- Damodar N. Gujarati, DCP (2013). *Ekonometrika Dasar*. Dalam *Ekonometrika Pengantar: Pendekatan Praktis* .
- Eita, JH, & Ashipala, JM (2010). Faktor Penentu Pengangguran di Namibia. *Jurnal Internasional Bisnis dan Manajemen* , 5 (10), 92–104. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v5n10p92>
- Eni. (2017). Memahami PDRB. *Angewandte Chemie Edisi Internasional*, 6(11), 951–952. , Mi , 5–24.
- Farid, A. (2007). ANALISIS TINGKAT PENGANGGURAN DI INDONESIA TAHUN 1980-2007 Farid Alghofari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. *Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007* .
- Fikri, I., & Anis, A. (2023). Pengaruh Pembayaran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi terhadap Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Studi Ekonomi dan Pembangunan* , 5 (1), 37. <https://doi.org/10.24036/jkep.v5i1.14419>
- Gujarati. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika* (Edisi Baru). Selemba Empat.
- Haikal, R. (2023). *PERBANDINGAN RASIO INVESTASI DOMESTIK DAN GENDER TERHADAP PENGANGGURAN TERBUKA DI INDONESIA TESIS*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh .
- Huda, IU, & Karsudjono, AJ (2021). Belanja Daerah Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Banjarmasin. *JURNAL KOMUNIKASI, BISNIS DAN MANAJEMEN AL-KALAM* , 8 (2), 50. <https://doi.org/10.31602/al-kalam.v8i2.5298>
- Isnayanti, ND, & Ritonga, A. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1978-2014 dengan Metode Ordinary Least Square. *KARISMATIKA: Kumpulan Artikel Ilmiah, Informatika, Statistika, Matematika dan Aplikasi* , 3 (2), 180–197. <https://doi.org/10.24114/jmk.v3i2.8809>

- Admiral, R. (2016). Pengaruh PDRB terhadap Pengangguran di Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. *PENGARUH PENGGUNAAN PASTA LABU KUNING (Cucurbita Moschata) SEBAGAI PENGANTI TEPUNG TERIGU DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG ANGKAK DALAM PEMBUATAN MI KERING*, 274–282.
- Leasiwal, TC (2021). Analisis Longitudinal Pengaruh Pembayaran, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Maluku. *Indonesia. Jurnal Kewirausahaan Internasional*, 25 (6), 2021.
- M, Arizal, dan MM (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ecogen*, 2 (3), 433. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v2i3.7414>
- Nanga, M. (2005). Teori, Masalah, dan Kebijakan Ekonomi Makro. Di *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Naza, DAA, Rahmadi, S., & Rosmeli, R. (2020). Analisis Belanja Daerah Menurut Urusan dan Hubungannya dengan Jumlah Pengangguran di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 9 (2), 101–108. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v9i2.12483>
- Nursafitri, S. (2020). *TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI JAWA TIMUR TAHUN 2013-2018 Oleh: TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI JAWA TIMUR Diserahkan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mata Kuliah Ekonomi Oleh: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*.
- Putri Apriyanti. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Rendah dan Rendah Terhadap Jumlah Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung Tahun 2011-2021 Ditinjau dari Perspektif Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Rendah dan Rendah Terhadap Jumlah Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung Tahun 2011-2021 Ditinjau dari Perspektif*.
- Ravika Famala Sari, N. (2016). Pengaruh Faktor Makroekonomi terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Timur Tahun 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14, 71–84.
- Sari, AI (2021). *Analisis PDB Sektor Industri Manufaktur Indonesia Tahun 1990-2019 dengan Pendekatan ECM*. UNIVERSITAS TIDAR.
- Sasana, H. (2006). Analisis dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Pembangunan*, 3 (2), 145–170.
- Saniah, R., & Murtala, M. (2024). Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto Dan Belanja Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 6(3), 31. <https://doi.org/10.29103/jeru.v6i3.15182>
- Setiawan, J., Saleh, M., & Yuliati, L. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015. *Jurnal Ekuilibrium*, II (1), 31–37.
- Soeharjoto dan Mitha Rachma Oktavia. (2021). Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Gaji Rendah Provinsi terhadap Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*, 5 (2), 94–102.
- Sukirno, S. (2012). Teori Pengantar Ekonomi Makro jilid 3. Di *Jakarta*.
- Sungkar, SN & NMN (2015). Dampak Pembayaran Rendah terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pascasarjana, Universitas Syiah Kuala*, 3 (2), 40–53.
- T. Aprilsesa, M. Tahir, S. Aminah, MM (2023). Tinjauan Hukum Pembayaran bagi Pekerja di Bawah Upah Minimum Provinsi. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Islam dan Lembaga Sosial*, 5 (1), 585–592. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.1997>
- Wahyuni, L., & Murtala. (2019). Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto Dan Investasi. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, VIII(2), 1–8.
- Wirawan, S. (2019). Analisis Pengeluaran Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 18(2), 63.
- Y, Y. & AR (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Rendahnya Gaji terhadap Tingkat

Pengangguran di Provinsi Maluku Utara. *JFRES: Jurnal Studi Ekonomi Fiskal dan Regional* , 2 (1), 34–47. <https://doi.org/10.36883/jfres.v2i1.18>

Yudisthira, IM, & Budhiasa, IGS (2013). Analisis Pengaruh Konsumsi, Investasi, dan Inflasi terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia Tahun 2000-2012. *E-Jurnal EP Unud* , 2 (11), 492–501.

